

# GERAKAN LIBERALISME DI JEPANG

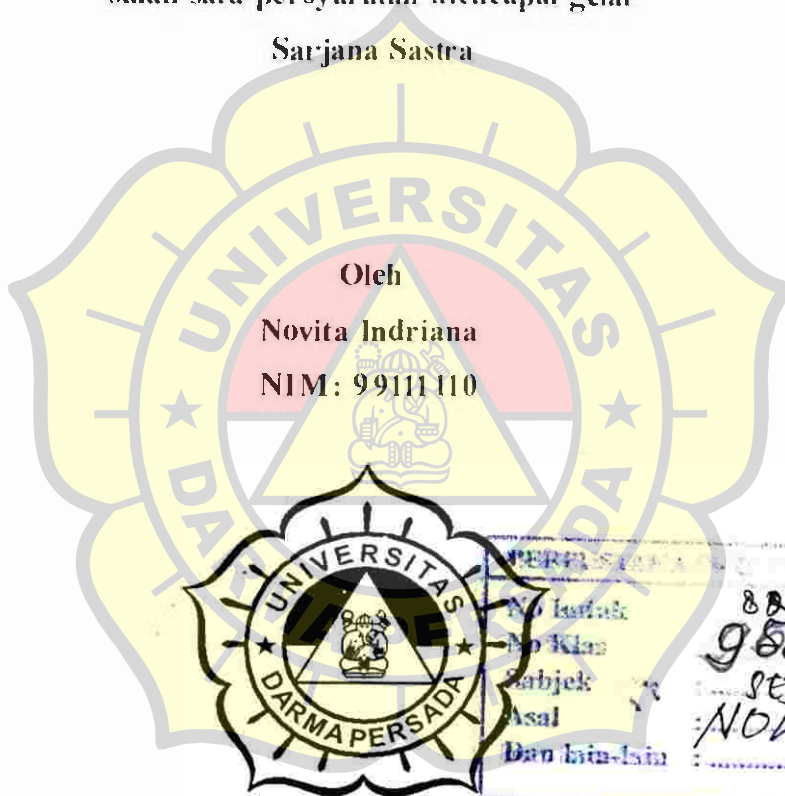
## PRA PERANG DUNIA II

Skripsi Sarjana ini diajukan sebagai  
salah satu persyaratan mencapai gelar  
Sarjana Sastra

Oleh

Novita Indriana

NIM: 991111110



JURUSAN SASTRA JEPANG  
FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA

2004

Halaman persetujuan pembimbing

Skripsi yang berjudul

**GERAKAN LIBERALISME DIJEPANG**

**PRA PERANG DUNIA II**

Oleh:

Novita Indriana

NIM: 99111110

Disetujui untuk diujikan dalam sidang ujian skripsi  
sarjana oleh:

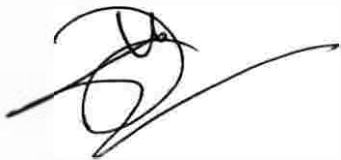
Mengetahui

Ketua Jurusan Bahasa dan

Dekan

Sastra Jepang

Fakultas Sastra



(Dra. Yuliasih Ibrahim)



FAKULTAS SASTRA



(Dra. Hj. Inny C. Haryono, MA)

Skripsi ini telah diujikan pada hari senin, tanggal 23 Agustus 2004.

Panitia ujian:

Pembimbing/ Penguji I

Ketua Panitia

( Samsul Bahri, SS )

(Dra. Tini Priantini)

Pembimbing/ Penguji II

Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Jepang

(Nani Dewi Sunengsih, SS)

(Dra. Yuliasih Ibrahim)

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kebesaran karunia-Nya, sehingga penulis dengan segala keterbatasan yang ada dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Gerakan Liberalisme Di Jepang Pra Perang Dunia II".

Selesainya skripsi ini tak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih. Semoga Tuhan membalas amal kebajikannya. Amin.

Dengan tidak mengurangi rasa terima kasih, penulis meniadakan bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan.

**Universitas Darma Persada**

Penulis

Jakarta

Agustus 2004

Novita Indriana

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii

### **BAB I PENDAHULUAN**

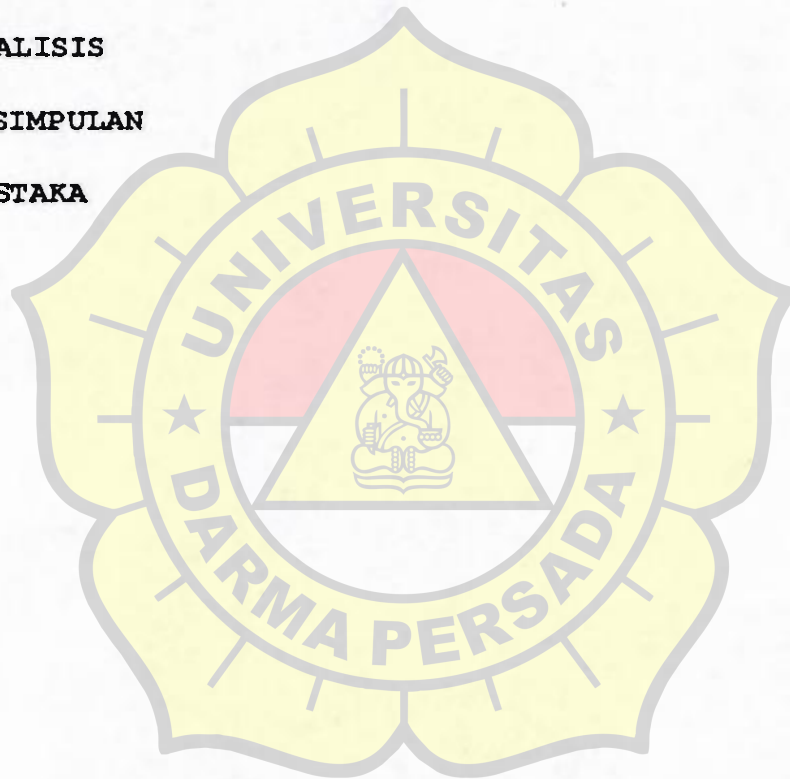
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	9
1.3 Tujuan Penulisan .....	10
1.4 Ruang Lingkup .....	10
1.5 Metode Penelitian .....	10
1.6 Sistematika Penulisan .....	10

### **BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN LIBERALISME JEPANG**

2.1 Gerakan Liberalisme Era Sebelum Perang Dunia II .....	13
2.1.1 Era Meiji .....	13
2.1.2 Era Taisho .....	19
2.2 Gerakan Liberalisme Era Setelah Perang Dunia II .....	20
2.2.1 Era Kependudukan Tentara Sekutu .....	20

**BAB III DAMPAK DARI PENERAPAN LIBERALISME DI JEPANG**

3.1 Penerapan Liberalisme di	
Bidang Politik	..... 36
3.2 Penerapan Liberalisme di	
Bidang Ekonomi	..... 41

**BAB IV ANALISIS****BAB V KESIMPULAN****DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Selalu menarik untuk dicermati apabila paham liberalisme ditawarkan dalam kehidupan sosial, politik, dan kehidupan bernegara di bangsa-bangsa timur. Salah satu ciri dari bangsa-bangsa timur adalah kuatnya sistem feodal dan banyak rambu-rambu etika sosial yang tidak mudah disingkirkan. Jepang adalah salah satu negara atau bangsa yang termasuk mempunyai ciri bangsa timur di atas. Oleh karena itu menarik untuk disimak bagaimana paham liberalisme yang berasal dari bangsa-bangsa di barat dicoba diterapkan pada bangsa timur seperti Jepang.

Paham liberalisme mempunyai arti yaitu sebuah tingkah laku, filosofi, atau gerakan yang sangat memperdulikan terciptanya kebebasan bagi individu-individu dan kemajuan-kemajuan sosial. Saat ini liberalisme dan demokrasi dianggap mempunyai kesamaan dalam tujuan-tujuannya, tapi di masa sebelumnya banyak kaum liberal menganggap demokrasi menawarkan atau kurang

sehat bagi masyarakat karena merangsang banyak orang untuk secara gegabah berpartisipasi dalam bidang politik. Walaupun begitu, liberalisme pada akhirnya dianggap sebagai sebuah dampak dari demokrasi dimana liberalisme sebagai sebuah gerakan yang bertujuan mengubah dan memajukan tatanan sosial.

Perjuangan liberalisme pada sebuah negara sering tergantung dari tingkat sekulerisme. Bila pada negara-negara sekuler, yaitu negara yang memisahkan sistem politiknya dari sistem-sistem keagamaan, liberalisme berarti perjuangan untuk mereformasi bidang sosial, politik dan ekonomi. Bila pada negara-negara yang paham agama begitu berpengaruh pada system politik, liberalisme biasanya berarti perjuangan untuk pembebasan atau pemisahan paham dan simbol-simbol religius dari dunia politik.

Pada politik tingkat domestik suatu negara, kaum liberal biasanya berjuang menentang segala sesuatu yang berbau feodal karena mencegah individu-individu yang dianggap berkelas sosial rendah untuk berkembang menggali dan mengamalkan potensi diri. Pada perpolitikan internasional, kaum liberal berjuang untuk menentang



dominasi militer dari sebuah negara terhadap negara lainnya dan penghapusan kolonialisme. Dalam bidang ekonomi, kaum liberal berjuang menghapus monopoli dan kebijakan-kebijakan perdagangan atau ekonomi pemerintah yang terlalu kuat mengontrol sektor ini sehingga pihak swasta tidak diberi kesempatan seluas-luasnya. Pada bidang keagamaan, kaum liberal telah berjuang menentang pengaruh gereja pada urusan-urusan kenegaraan dan menentang tekanan-tekanan kelompok-kelompok keagamaan dalam mempengaruhi opini publik.

Menarik untuk dibahas bagaimana paham liberalisme sebagai sebuah paham yang di impor dari barat dapat hidup berkembang dan menyesuaikan diri dalam kehidupan bernegara di Jepang. Dimulai pada kurun akhir abad ke sembilan belas, kaum reformis di Jepang memperkenalkan teori-teori politik dari negara-negara barat seperti Jerman, Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat saat dimana kaum reformis berusaha mencari dan merumuskan inovasi-inovasi baru pada bidang politik. Namun disaat yang sama kaum reformis Jepang juga kebingungan dengan

sikap standar ganda yang dicontohkan barat dalam hal dominasi-dominasi ekonomi yang mengancam Jepang.<sup>1</sup>

Setelah menyetujui ultimatum Deklarasi Postdam dari Amerika Serikat, Inggris, dan Cina, tanggal 26 Juli 1945, Kaisar Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945 mengeluarkan dekrit kepada seluruh tentara dan rakyat Jepang agar berhenti perang, dan pada tanggal 2 September 1945 ditandatangani Instrument of Surrender.

Mulai tanggal itu Kaisar dan Pemerintah Jepang berfungsi dibawah kekuasaan SCAP (Supreme Commander for the Allied Powers) yang memimpin tentara pendudukan Amerika Serikat atau Sekutu di Jepang atas nama Amerika Serikat dan sekutunya.<sup>2</sup>

Misi pokok SCAP, Jendral Douglas MacArthur dari Amerika Serikat, meliputi: demobilisasi, demiliterisasi, dan demokratisasi kehidupan Jepang. Dalam rangka ini telah dapat diganti UUD Meiji 1889 dengan UUD baru Jepang yang membawa perubahan-perubahan sangat mendasar, berdasarkan ajaran pokok demokrasi liberal barat.<sup>3</sup> Maka, kalau tadinya kedaulatan ada ditangan Kaisar yang

---

<sup>1</sup> Sejarah Institusi Politik Jepang, Ryosuke Ishii, 1989

<sup>2</sup> ibid

<sup>3</sup> ibid

dianggap dewa dan tidak dapat diganggu gugat, menurut UUD 1946 yang baru, Kaisar hanya simbol atau lambang negara dan kesatuan rakyat Jepang. Kedaulatan ada ditangan rakyat. Pemerintah dipimpin Perdana Menteri serta anggota kabinetnya yang bertanggung jawab kepada parlemen yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen adalah pemegang kekuasaan paling tinggi dan merupakan satu-satunya lembaga pembuat undang-undang.

Sejak tanggal 2 September 1945, hari penandatanganan "Instrument of Surrender", Jepang diperintah oleh SCAP atas nama Amerika Serikat dan sekutunya dalam Perang Pasifik. SCAP memerintah Jepang dengan menggunakan Kaisar dan Pemerintah Jepang, yaitu dengan pengeluaran instruksi yang dialamatkan kepada "Pemerintah Kekaisaran Jepang".<sup>4</sup>

Di Markas Besar SCAP ada Seksi Pemerintahan Militer yang membantu SCAP dalam tugasnya memerintah Jepang. Untuk bimbingan dan pengawasan tentang pelaksanaan instruksi SCAP oleh pihak Jepang, di ibukota tiap Ken atau Fu sebagai daerah otonomi Jepang, ditempatkan Tim Pemerintahan Militer, yang bertugas dibawah Komando

---

<sup>4</sup> Ibid

Panglima Tentara Amerika Serikat ke-8 di Yokohama dan bertanggungjawab kepada SCAP.

Ancaman hukuman terhadap pelanggaran instruksi SCAP khususnya dan terhadap perbuatan menentang politik atau kebijakan pendudukan militer Amerika Serikat dan sekutunya di Jepang pada umumnya, telah diatur dengan peraturan pemerintah dari tahun 1946, yang diperkuat tahun 1950. Sekalipun SCAP mewakili AS dan sekutunya, dalam praktek aparaturnya dan politik AS yang dominan. Maka dalam prakteknya pula, bendera yang dominan berkibar di kantor dan instalasi pendudukan militer adalah bendera Amerika Serikat, the Stars and Stripes.<sup>5</sup>

Pendudukan militer AS dan sekutunya berakhir pada tanggal 20 April 1952, sesuai perjanjian perdamaian yang ditandatangani di San Fransisco tahun 1951.<sup>6</sup>

Setelah "insiden Manshuu" tahun 1931, rejim kekuatan militer Jepang makin bertambah berkuasa, sehingga akhirnya di tahun 1940 semua partai politik terpaksa bubar dan gerakan demokrasi terhenti. Baru setelah perang pasifik selesai, gerakan kepartaian hidup kembali. Dan dalam rangka demokratisasi, berdirilah beberapa

---

<sup>5</sup> ibid

<sup>6</sup> ibid

partai, antara lain: 1. Partai Liberal Jepang (November 1945), 2. Partai Progresif Jepang (November 1945), 3. Partai Gerakan Bersama Jepang (Desember 1945), 4. Partai Sosialis Jepang (November 1945), 5. Partai Komunis Jepang (Desember 1945).<sup>7</sup>

Perlu dicatat bahwa munculnya perang dingin dan khususnya sebaran mendadak dari Korea Utara yang komunis terhadap Korea Selatan di bulan Juni 1950 membuat AS dan kawan-kawan agak panik, dan memaksa Amerika Serikat mengubah politik dan strateginya terhadap Jepang. Serangan Korea Utara ini dianggap oleh Amerika Serikat dan sekutunya sebagai serangan blok Timur/komunis terhadap blok Barat/AS dan sekutunya.

Dalam suasana itu AS segera berusaha menjadikan Jepang ada dipihaknya dalam menghadapi Korea Utara atau pihak komunis.<sup>8</sup>

Dibulan Desember 1954 jabatan Perdana Menteri dipegang oleh Hayotama, seorang ultra-nasionalis dan pernah terdaftar sebagai penjahat perang kelas A. Ia mampu menyatukan semua partai dan golongan yang konserfatif dalam satu partai baru, bernama Partai

---

<sup>7</sup> ibid

<sup>8</sup> ibid

Demokrasi Liberal/ Liberal Democratic Party (LDP),  
November 1955.<sup>9</sup>

Dalam struktur politik 1955, LDP disatu pihak merupakan badan konsolidasi dari semua unsur konserfatif untuk melawan pihak yang lain yakni kekuatan partai sosialis dan partai komunis.

LDP terbentuk dari gabungan 3 partai yaitu Partai Libera. Jepang, Partai Progresif Jepang, dan Partai Gerakan Bersama Jepang.<sup>10</sup>

Partai Liberal Jepang di tahun 1950 akhirnya disebut Partai Liberal dan kemudian diperkuat unsur-unsur kekuatan politik konserfatif tua yang diantaranya ultra-nasionalis. Adapun Partai Progresif bergabung dengan Partai Gerakan Bersama di tahun 1950 dan menjadi Partai Demokrat di bulan November 1954.<sup>11</sup>

unsur-unsur demokrasi dan liberalisme sebetulnya sudah ada sejak Reformasi Meiji (1889). Dalam sejarah perjuangan, kekuatan demokrasi ini mencapai puncaknya dalam dekade 1920-an, untuk kemudian terdesak mundur sama sekali oleh kekuatan ultra-nasionalis dan militeris.

---

<sup>9</sup> ibid  
<sup>10</sup> ibid  
<sup>11</sup> ibid

Sesudah Perang Dunia II liberalisme kembali menguat dikarenakan mempunyai keleluasaan melalui LDP yang secara terus-menerus memegang kekuasaan. Dalam pada itu, jika ide kepartaian dan segala bentuk formal lembaga-lembaga sarananya sejak jaman Meiji diimpor dari barat, maka dalam prosedur operasionalnya masih dialaminya pengaruh jiwa khas masyarakat Jepang beserta sistem nilai dan sikap yang melandasinya, sekalipun makin lama makin berkurang.

## 1.2 PERMASALAHAN

Permasalahan yang dibahas adalah tentang tantangan-tantangan yang dihadapi Liberalisme di Jepang sebagai sebuah paham pemikiran, Filosofi, dan gerakan demokrasi dikaitkan dengan kondisi Jepang sebagai sebuah negara maju yang modern namun tidak bisa begitu saja lepas dari warisan-warisan budaya dan nilai-nilai kehidupan sebagai sebuah bangsa timur.

### **1.3 TUJUAN PENULISAN**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk: mencoba memahami lebih dalam tentang dampak liberalisme sebagai sebuah paham pemikiran dan gerakan demokrasi dalam mempengaruhi sejarah perpolitikan Jepang dan bagaimana paham ini berkembang menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik yang ada di Jepang.

### **1.4 RUANG LINGKUP**

Penulis membatasi permasalahan hanya pada sejarah dan dampak perkembangan liberalisme di Jepang dalam kurun waktu sesuai PD II sampai dengan dekade 1990-an.

### **1.5 METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode kajian perpustakaan; dengan menggunakan sumber-sumber yang menjadi koleksi perpustakaan Universitas Darma Persada, serta kajian melalui situs-situs internet.

### **1.6 SISTEMATIKA PENULISAN**

BAB I        PENDAHULUAN



Pada BAB I ini diuraikan tentang latar belakang dipilihnya topik dampak liberalisme sebagai sebuah paham pemikiran dan gerakan demokrasi yang dicoba dikembangkan di Jepang, juga disampaikan ruang lingkup, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN LIBERALISME DI JEPANG

Pada BAB II ini diuraikan tentang sejarah perkembangan liberalisme di Jepang melalui era sebelum Perang Dunia ke-2 yaitu di era Meiji dan era Taisho, serta perkembangan liberalisme pada era setelah Perang Dunia ke-2.

## BAB III DAMPAK-DAMPAK YANG DIHASILKAN LIBERALISME DI JEPANG

Pada BAB III ini diuraikan dampak-dampak dari liberalisme pada bidang politik dan pada bidang ekonomi di Jepang.

## BAB IV ANALISIS

Pada BAB IV ini diuraikan tentang analisis dari liberalisme versi Jepang yang berbeda dari Liberalisme di negara-negara barat.

## BAB V KESIMPULAN

Pada BAB V ini diuraikan tentang kesimpulan dari seberapa jauh rakyat Jepang menerima liberalisme.

